

## KONSEP SEKOLAH ISLAM TERPADU (Kajian Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia)

Oleh : Kurnaengsih, M.Ag

### Abstrak

Munculnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan nasional dianggap gagal membentuk moral para siswa dan melindungi mereka dari penggunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, dan kenakalan. Kekhawatiran seperti ini terutama menyebabkan orang-orang kota yang secara langsung menyaksikan pengaruh negatif dari modernisasi dan globalisasi. Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran sebagian kalangan Muslim mengenai perlunya menggabungkan antara ilmu pengetahuan umum dengan pendekatan Islam.

### Kata Kunci

Pendidikan Islam, Sekolah Islam Terpadu, Madrasah,

### A. Pendahuluan

Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan model baru dalam wacana pengembangan lembaga pendidikan formal di Indonesia. Sebagai indikasinya, diskusi mengenai model pendidikan di Indonesia dari sejak berdirinya Negara Indonesia hingga akhir abad 20-an, hanya terdiri dari sekolah umum dan pesantren. Sekolah umum merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan penjajah Belanda yang mengajarkan ilmu-ilmu umum yaitu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu teknik, dan Bahasa Inggris. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan ciri khas di dalamnya terdapat masjid, kyai, santri, dan pengajaran kitab kuning. Pesantren, pada awalnya, hanya mengajarkan 100% mata pelajaran agama.<sup>1</sup> Tujuan pendidikan di pesantren adalah untuk menghasilkan para ahli ilmu agama.<sup>2</sup>

---

**Kurnaengsih, M.Ag** adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, mendapat gelar Magister Agama Islam (M.Ag) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini aktif menjadi Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Inisiatif untuk memodernisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an ketika Menteri Agama, Mukti Ali, mengenalkan standardisasi sistem pendidikan madrasah melalui kerjasama antara 3 kementerian yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri. Kemudian modernisasi pendidikan di madrasah diperkuat oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989, yang menyatakan bahwa madrasah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.<sup>3</sup> Bahkan pemerintah telah memperkuat posisi madrasah dengan mengeluarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa madrasah setara dengan sekolah umum.<sup>4</sup> Namun demikian, hingga saat ini madrasah masih tetap menjadi lembaga pendidikan kelas dua.<sup>5</sup>

Semakin tingginya partisipasi kalangan santri dalam pendidikan telah menyebabkan adanya mobilitas vertikal dan horizontal, dan bahkan telah muncul golongan menengah baru yang sering disebut dengan kelas menengah Muslim.<sup>6</sup> Fenomena ini ditandai dengan tersebarnya kaum santri ke berbagai sektor profesi dan bahkan tidak sedikit yang menjadi pegawai pemerintah. Munculnya kelas menengah Muslim terkadang memunculkan diskusi menarik mengenai hubungan antara Islam dan Negara. Bahkan mereka menerima pancasila sebagai ideologi Negara yang menyatukan seluruh bangsa dan bersatu dengan pemerintah dalam berusaha mempercepat proses pembangunan. Fenomena ini terjadi seiring sejalan dengan pergeseran kebijakan Negara yang lebih berpihak kepada Islam pada akhir 1980-an ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Soeharto sebagai pelindungnya. Bagian dari usaha-usaha mereka untuk mengenalkan simbol-simbol dan lembaga-lembaga islami kepada masyarakat luas, kelas menengah Muslim melakukan berbagai eksperimen untuk mengislamisasikan pendidikan formal. Mereka tidak hanya mengangkat isu-isu tentang larangan memakai jilbab bagi siswi di sekolah umum, tetapi mereka juga membuat sejumlah sekolah-sekolah Islam yang berkualitas yang menggabungkan pendidikan sekuler dengan pendidikan Islam. Beberapa contoh sekolah-sekolah model ini adalah al-Azhar, al-Izhar, Muthahhari, Insan Cendekia, Madania, Bina Insan, Dwi Warna, Lazuardi, Fajar Hidayah, Nurul Fikri, dan Salman al-Farisi.<sup>7</sup>

Tidak seperti madrasah yang biasanya memiliki fasilitas yang serba terbatas dan para siswanya berasal dari kalangan miskin dan menengah ke bawah, kualitas sekolah-sekolah Islam tampak menjadi sekolah-sekolah elit dengan merekrut para siswa dari kalangan menengah ke atas dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang *excellent* dan mahal, seperti ruangan ber-AC, perpustakaan digital dan laboratorium. Beberapa di antara mereka mengadopsi sistem *boarding school* yang berorientasi pada penanaman kedisiplinan dan kesalehan siswa dalam beragama. Pada dasarnya sekolah-sekolah Islam itu dibuat model seperti sekolah-sekolah umum dan secara administratif berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menetapkan kurikulum, sistem ujian, dan seluruh organisasi sekolah. Akan tetapi, karakter keislamannya tampak pada cara sekolah memberikan perhatian pendidikan moral keagamaan. Pertumbuhan sekolah-sekolah Islam berkualitas seperti ini tidak diragukan lagi diinspirasi oleh adanya usaha islamisasi pendidikan formal dan pertumbuhan Sekolah Islam Terpadu.<sup>8</sup>

## B. Pembahasan

Ide mendirikan Sekolah Islam Terpadu mulai didengungkan oleh para aktivis Jamaah

Tarbiyah pada akhir dekade 1980-an. Ide pendiriannya diawali oleh para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan beberapa universitas ternama lainnya yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mereka adalah para aktivis Islam kampus yang berperan penting dalam menyebarkan ideologi Islam kepada para mahasiswa. Kalangan pemuda menjadi target utama dari gerakan ini karena mereka percaya bahwa para pemuda akan menjadi agen perubahan sosial yang sangat penting dalam melakukan islamisasi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>9</sup> Tugas untuk menyiapkan generasi muda Muslim yang punya komitmen dakwah diyakini akan lebih efisien jika melalui pendidikan. Dalam konteks ini, mereka mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Fikri yang telah menginspirasi berdirinya sekolah-sekolah dengan berbagai aktivitas dakwah dari berbagai organisasi-organisasi Islam dan yayasan-yayasan pribadi, termasuk al-Furqon, at-Taqwa, al-Ikhlas, Izzuddin, al-Itqon, Auliya, dan Nur Hidayah.<sup>10</sup>

Munculnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan nasional dianggap gagal membentuk moral para siswa dan melindungi mereka dari penggunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, dan kenakalan. Kekhawatiran seperti ini terutama menyebabkan orang-orang kota yang secara langsung menyaksikan pengaruh negatif dari modernisasi dan globalisasi. Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran sebagian kalangan Muslim mengenai perlunya menggabungkan antara ilmu pengetahuan umum dengan pendekatan Islam.

Wacana pemaduan sains dan Islam meningkat seiring sejalan dengan tumbuh suburnya ideologi Islam yang sangat asertif dalam mencoba mengimplementasikan berbagai visi-visi Islam dalam pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini tidaklah mengherankan karena para pendiri Sekolah-sekolah Islam Terpadu secara umum memiliki semangat yang tinggi untuk meniru dan mengulangi kembali “zaman keemasan Islam” yang dianggap lebih murni, Islam ideal yang mana kehidupan zaman sekarang harus didasarkan. Dalam pandangan mereka, cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang terpadu di mana cara hidup dan integritas moral para siswa dapat dibentuk secara sistematis dengan cara Islam, yang sesuai dengan uswah hasanah Nabi Muhammad saw. dan generasi Islam awal.<sup>11</sup> Dalam sistem ini, para siswa secara simultan dilatih dan dididik untuk menerima Islam sebagai sistem aturan yang lengkap baik dalam agama, sosial, budaya, dan ekonomi dan mencakup semua urusan material, spiritual, sosial, dan individual.<sup>12</sup>

Fenomena munculnya Sekolah Islam Terpadu disinyalir oleh Yudian Wahyudi, bahwa setelah babak belur hampir tiga abad, barulah umat Islam, khususnya di Indonesia, mulai sampai pada pengertian kembali kepada al-Quran dan Sunnah yang benar. Kembali kepada al-Quran dan Sunnah bukan kutukisme, tetapi *tauhid al-‘ulūm* (atau kesatuan ilmu yang meliputi ayat quraniyah, ayat kauniyah, dan ayat insaniyah). Dengan semangat inilah lahir Sekolah-sekolah Islam Terpadu.<sup>13</sup>

Salah satu hal yang cukup menakjubkan dari Sekolah Islam Terpadu adalah mereka berada di bawah satu payung Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yang telah berdiri pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi berdirinya Sekolah

-sekolah Islam Terpadu. Fokus utama JSIT adalah mengkoordinasi berbagai Sekolah Islam Terpadu bersama-sama berada di bawah payung yang sama dengan spirit solidaritas dan *salafisme* dengan kembali mencontoh Nabi Muhammad saw. dan generasi Muslim awal. Ada berbagai macam sekolah yang berada di bawah payung JSIT namun operasinya berada di bawah yayasan yang berbeda, termasuk al-Mu'adz, Insan Mulia, al-Farabi, Ibnu Abbas, Salman al-Farisi, al-Khairat, dan al-Madinah.<sup>14</sup>

JSIT memiliki peran yang sangat penting dalam membantu aktivis dakwah di seluruh Indonesia untuk mengembangkan sekolah-sekolah mereka melalui pertukaran jaringan dan informasi. Dalam konteks ini, JSIT muncul sebagai *franchise* yang menawarkan kepada setiap orang dalam mengembangkan dan membangun sekolah mereka. JSIT hanya memberikan *blue-print* dan *guide-line* tentang bagaimana mendirikan sekolah. Dengan bergabung JSIT, sekolah diatur di bawah bendera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diperkenankan untuk menggunakan kurikulum yang dirumuskan oleh JSIT. JSIT tidak mencampuri urusan internal sekolah, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Sampai saat ini, JSIT memiliki 7 cabang di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia terbagi menjadi tujuh wilayah yang meliputi (1) Sumatra bagian utara, (2) Sumatra bagian selatan, (3) Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, (4) Jawa Tengah dan Yogyakarta, (5) Kalimantan, (6) Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan (7) Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap cabang regional memiliki satu koordinator yang membawahi koordinator distrik. Para koordinator kebanyakan adalah para aktivis dakwah yang berafiliasi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satu aktor penting di belakang bedirinya JSIT adalah Fahmi Alaydroes, yang juga menjadi ketua PKS bidang yayasan pendidikan, Nurul Fikri.<sup>15</sup>

Sekolah-sekolah Islam Terpadu menarik untuk diteliti setidaknya karena sejumlah hal berikut. *Pertama* merebaknya sekolah jenis ini adalah adanya fenomena santrinisasi.<sup>16</sup> Muncul dan berkembangnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu tampaknya memiliki dampak yang berjangkauan luas terhadap masa depan masyarakat Muslim Indonesia. Sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan berkualitas tersebut tidak hanya memberi kontribusi pada perbaikan pendidikan Islam di Indonesia, melainkan juga pada proses santrinisasi masyarakat Muslim. Proses santrinisasi itu dapat digambarkan terjadi melalui dua cara, yaitu, (a), para siswa dari sekolah-sekolah itu umumnya telah mengalami "re-islamisasi". Sebagaimana telah diperlihatkan sebelumnya, disamping mempelajari ilmu-ilmu umum, mereka juga mempelajari secara intensif ilmu-ilmu keislaman. Selanjutnya (b), para siswa selanjutnya membawa Islam yang telah mereka pelajari di sekolah ke rumah, dalam banyak kasus, mereka bahkan mengajarkan kepada orang tua mereka yang acapkali hanya mengetahui sedikit tentang Islam. Umumnya orang tua merasa malu akibat ketidaktahuan mereka tentang Islam. Akibatnya agar tidak mengecewakan sang anak, mereka mulai mempelajari Islam, baik secara sendiri maupun dengan mengundang guru privat untuk mengajarkan kepada mereka tentang Islam.<sup>17</sup>

Dari sini menjadi jelas, bahwa pola baru re-islamisasi atau santrinisasi muncul di kalangan kelas menengah Muslim, tidak hanya di kalangan anak-anak, tetapi juga di kalangan orang tua. Pola santrinisasi ini agak unik. Secara tradisional, santrinisasi dianggap dilakukan terutama oleh para dai melalui kegiatan-kegiatan dakwah. Dakwah biasanya dilakukan melalui pengajian di masjid-masjid, atau ditempat-tempat lainnya di mana kaum

muslim melakukan kegiatan keagamaan. Fenomena santrinisasi ini tampaknya berbeda dari kedua jenis dakwah yang baru disebut tadi. Proses santrinisasi melalui sekolah-sekolah elit muslim dapat dikatakan merupakan semacam dakwah diam-diam atau lebih merupakan dakwah organik. Tidak ada dakwah formal dari ruang pengajian.<sup>18</sup>

Mengapa para orang tua Muslim mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Islam tersebut? Fenomena ini merupakan perkembangan terbalik di kalangan orang tua Muslim. Di masa lalu, banyak keluarga Muslim yang kaya mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah misionaris yang dari zaman Belanda hingga sekarang masih dikenal dengan kualitasnya yang baik. Bahkan di kalangan orang tua Muslim pernah ada semacam kebanggaan bila anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah misionaris. Para pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, terkadang menyebut gejala santrinisasi ini dengan istilah “kebangkitan Islam” di Indonesia. Tentu saja perdebatan mengenai jenis, jangkauan, dan implikasi-implikasi dari santrinisasi atau kebangkitan Islam belakangan ini masih tetap berlanjut; misalnya apakah ia bersifat politis atau kultural.

*Kedua*, berkembangnya fenomena islamisme.<sup>19</sup> Islamisme secara tradisional didefinisikan sebagai Islam yang dipahami sebagai ideologi.<sup>20</sup> Namun, pengertian ini tidak menyiratkan bahwa islamisme merupakan penerapan agama dalam politik semata. Kelompok islamis memperluas ide tradisional Islam sebagai agama yang mencakup segala dimensi pada masyarakat modern.<sup>21</sup> Dalam pandangan mereka, Islam harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat tersebut, dari cara pemerintahan, ekonomi, sistem hukum, hingga kebudayaan dan pendidikan. Dalam hal ini, islamisme lebih merupakan upaya untuk menegaskan kembali pesan-pesan politik, sosial, dan ekonomi yang diperjuangkan oleh kalangan islamis, yang mereka klaim sebagai watak inheren dari sistem itu sendiri, ketimbang merupakan perluasan agama ke wilayah politik.

Kaitan antara islamisme dengan Sekolah-sekolah Islam Terpadu dapat dilacak dari sejarah lahir dan berkembangnya lembaga tersebut. Munculnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu dipengaruhi oleh gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin. Pengaruh tersebut misalnya tampak dalam cara sekolah memberi penekanan terhadap kebutuhan menanamkan kerangka pikir islami ke dalam pola pikir para siswa dan menanamkan komitmen kepada Islam sebagai persiapan proses jangka panjang untuk mengimplementasikan syariah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penekanan ini merupakan kekecewaan dan ketidaksabaran masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ada yang diyakini telah mengalami krisis paradigma, visi, misi, pengembangan, manajemen, komunikasi, dan bahkan dalam proses dan pendekatan pembelajaran.<sup>22</sup>

Masalah tersebut dianggap tidak dapat dipisahkan dari penerapan sistem pendidikan sekuler. Meminjam konsep yang diperkenalkan oleh Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, visi Sekolah-sekolah Islam Terpadu adalah untuk mentransformasi generasimuda muslim Indonesia menjadi generasi yang *rabbany*.<sup>23</sup> Generasi *rabbany* adalah generasi yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan dan hanya menjadikan aturan Tuhan sebagai sumber rujukan dan paradigma untuk menuntun pikiran dan tindakan kaum Muslim. Dari perspektif mereka, tidak ada pikiran dan tindakan kecuali didedikasikan untuk mengingat Allah yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta beserta isinya.<sup>24</sup>

Konsep pendidikan Hasan al-Banna telah menginspirasi para aktivis yang

dikembangkan oleh gerakan Tarbiyah yang menjadi tulang punggung terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pendidikan dianggap memiliki peran penting sebagai basis kampanye kaum Muslim. Sekolah-sekolah Islam Terpadu diharapkan menjadi garda depan di saat kaum Muslim dikalahkan oleh serangan globalisasi. Sekolah Islam Terpadu didirikan dalam rangka mengembalikan kejayaan lembaga pendidikan Islam pada zaman keemasan Islam. Ia dijadikan sebagai jembatan untuk menghapuskan adanya dikotomi antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu keagamaan, ketika dikotomi ini dianggap menjadi penyebab lemahnya lembaga pendidikan Islam. Pada akhirnya, Sekolah Islam Terpadu tidak hanya menjadikan Islam sebagai objek studi semata-mata, tetapi juga sebagai cara hidup, yang mampu menjadikan para siswa tetap *survive* dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan.

Sekolah Islam Terpadu menekankan pada penanaman mata pelajaran keagamaan seperti teologi (akidah), moral (akhlaq), dan ibadah praktis. Sesuai dengan teori pendidikan al-Banna, ia bertujuan untuk membangun karakter dan moralitas siswa dengan warna Islam yang direfleksikan dalam cara berpikir, sikap, dan praktik kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan tersebut tidak hanya sekedar untuk menanamkan pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, tetapi pendidikan dijadikan sebagai cara membentuk pribadi Muslim yang utuh baik dari segi berpikir maupun berperilaku.

### C. Penutup

Sekolah Islam Terpadu muncul dan berkembang karena gerakan Jamaah Tarbiyah. Pada akhir dekade 1980-an Jamaah Tarbiyah sedang memasuki *mihwar mu'assasi* (tahap pendirian organisasi dan kelembagaan). Para aktivis Jamaah Tarbiyah mendirikan sekolah ini karena semakin terbukanya struktur kesempatan politik pada masa Orde Baru ketika pada saat itu rezim Orde Baru melakukan politik akomodasi kepada umat Islam Indonesia. Selain mendirikan Sekolah Islam Terpadu, para aktivis gerakan Jamaah Tarbiyah juga mendirikan KAMMI dan Partai Keadilan (PK).

Terakhir, Sekolah Islam Terpadu merupakan bagian integral dari subsistem pendidikan nasional. Adopsi kurikulum dan sistem penilaian dari sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu semakin mempertegas bahwa lembaga pendidikan yang sedang berkembang ini masih menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia sebagaimana halnya dengan pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

### Catatan Kaki

1. Amr Abdalla, et.al., *Improving the Quality of Islamic Education in Developing Countries: Innovative Approaches* (Washington: Creative Associates International, Inc., 2006), hlm. 22.
2. Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ESThe Columbia Encyclopedia (1963) NY & London: Colombia University Press, 1986), hlm. 167-171.
3. Ahmad Syarief, *Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah* (Bandung: Citra Umbara, 1995), hlm. 144.
4. Lihat UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 ayat 1-3 dan pasal 18 ayat 1-4.
5. Secara umum kualitas madrasah di Indonesia kalah dibanding dengan sekolah-sekolah umum, kecuali beberapa madrasah, semisal Madrasah (Ibtidaiyah dan Tsanawiyah) Pembangunan Jakarta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Malang Jawa Timur, dan Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong. Di tengah rata-rata kualitas madrasah yang di bawah sekolah umum, beberapa madrasah tersebut memiliki kualitas yang

- tidak kalah dibanding sekolah-sekolah umum. Baca Azyumardi Azra, *Pendidikan*, hlm. 78, dan Sutrisno, *Fazlur Rahman, Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 203.
6. Azyumardi Azra, “Kelas Menengah Muslim”, *Opini*, Republika, 5 Januari, 2012, hlm. 12., dan Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Kelas Menengah Tujuh Juta Setiap Tahun?”, *Opini*, Republika, 10 Januari, 2012, h. 12.
  7. Azyumardi Azra dan Jamhari, “Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis”, Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty (penyunting), *Mencetak Muslim Modern Peta Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.
  8. Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 5.
  9. Baca Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104-107.
  10. Noorhaidi Hasan, *Islamist Party, Electoral Politics and Da’wa Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice (PKS) in Indonesia*, *Makalah*, S. Rajaratnam School of International Studies Singapore, 2008.
  11. Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009), hlm. 205.
  12. Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 7
  13. Yudian Wahyudi, “Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Maqaasid Syari’ah,” *Makalah*, disampaikan di hadapan sidang senat terbuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka mensyukuri kelahiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-55, tanggal 23 September 2006, hlm. 6.
  14. Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 8.
  15. Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 10.
  16. Kata santrinisasi merupakan bentuk Inggris dari dari istilah Jawa “santri” yang berarti “mereka yang berasal dari pesantren” atau arti yang lebih umum “mereka yang taat menjalankan ajaran Islam” sebagaimana dilawankan dengan “abangan” kaum muslim hanya dalam nama (nominal Muslim).
  17. Azyumardi Azra, *Pendidikan...*, hlm. 80.
  18. *Ibid.*
  19. Islamis secara sederhana dapat diartikan sebagai mereka yang menggunakan Islam sebagai landasan berpikir dan bergerak. Konsep islamisme masih menjadi konsep yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademi muslim. Banyak pakar yang menolak konsep ini karena penggunaannya dianggap memojokkan umat islam. Sebagai contoh, Prof. Ann Kumar, salah seorang pengajar senior di Australian National University (ANU) menyampaikan keberatan mengenai istilah islamis untuk melabelkan kelompok umat Islam yang berpolitik. Dia berkata, mengapa ketika umat Islam berpolitik dengan berlandaskan diri pada nilai-nilai keagamaan yang dianutnya dengan mudah orang menyebutnya sebagai islamis. Tetapi mengapa orang tatkala orang non-Muslim berpolitik dengan keyakinannya, pengamat Barat tidak serta merta menyebutnya sebagai “Hinduist”, “Buddhist”, ataupun “Cristianist”. Dalam konteks gerakan, istilah Islamis setidaknya mengandung ciri sebagai berikut. Pertama, mereka yang mengedepankan cara-cara damai, konstitusional, dan demokratis. Kedua, mereka yang mengedepankan cara damai, tetapi tidak mengakui demokrasi. Ketiga, mereka yang tidak mengakui konstitusi dan tidak pula menolak cara-cara kekerasan. Keempat, mereka yang mengakui eksistensi Negara yang ada berikut konstitusinya, tetapi tidak asing dengan cara-cara kekerasan. Kelima, mereka yang mendahulukan cara-cara yang inkonstitusional dan kekerasan. Lihat Firman Noor, “Problematika Istilah Islamis”, dalam *Republika*, 9 Juli 2012, hlm. 4. Sedangkan Oliver Roy mendefinisikan islamisme adalah gerakan-gerakan kontemporer yang menjadikan keyakinan Islam sebagai ideologi politik. Lihat Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Taurus Publisher, 1994), hlm. ix. Pemakaian istilah islamisme dalam penelitian ini lebih cenderung pada pengertian sederhananya yakni umat Islam yang menjadikan Islam sebagai kerangka berpikir dan melakukan gerakan, tanpa memiliki tendensi negatif.
  20. Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 27.
  21. Oliver Roy, *Globalised Islam: The Search for A New Umma* (London: C. Hurts and Company, 2004), hlm. 58.
  22. Amin Abdullah, “Religious Diversity and Islamic Education In Indonesia”, *Makalah*, presented in the Open Forum held by USINDO, Washington, November, 21, 2006, hlm. 3.
  23. Suzaina Kadir, “Emerging Trends in Islamic Education in Indonesia”, *Makalah*, Lee Kuan Yew School Public Policy, Presented in Redesigning Pedagogy International Conference, Singapore, June 2009, h. 10.
  24. Baca Hasan al-Banna, *Majmu’ah Rasa’il al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna* (Beirut: Muassasah al-Islamiyah, tt.), hlm. 181.
  25. Noorhaidi Hasan, *Islamizing...*, hlm. 11.